

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UUD 1945 Nomor 9 Tahun 1995 menjelaskan bahwa pembangunan nasional dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.² Pembangunan nasional merupakan wujud pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah. Di Indonesia, pemerintahan telah terbagi menjadi beberapa wilayah administratif yakni provinsi, kabupaten/kota besar dan desa/kota kecil.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa setiap wilayah otonomi daerah wajib melakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan.³ Pembangunan bagi suatu daerah merupakan suatu proses perubahan yang bertumpu pada aspek pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas di semua sektor secara terus menerus menuju kearah yang lebih baik. Sebagai salah satu daerah otonom, Kabupaten Tulungagung juga gencar melakukan pembangunan di berbagai lini. Pembangunan ini dilakukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, adil, dan makmur secara merata.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (1)

Salah satu ukuran kondisi sosial dan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan pemerintah di suatu daerah adalah adanya kemiskinan.⁴ Perlu diketahui bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak mampu memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, serta rasa dihormati orang lain.⁵ Menurut BPS dan Depsos RI kemiskinan dimaknai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (*inability of the individual to meet basic needs*).⁶

Di Kabupaten Tulungagung, kemiskinan masih menjadi masalah dalam pembangunan. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang terus menghantui masyarakat karena dapat menyebabkan individu atau kelompok berada pada posisi yang lemah dan tidak berdaya. Menurut Nurkse dalam teori “*the vicious cycle of poverty*”, ia mengasumsikan bahwa kemiskinan merupakan tingkatan pemasukan per kapita. Gagasan ini dilandaskan pada orang-orang dengan penghasilan besar bisa menabung, investasi serta mampu mempertahankan status yang sama, sebaliknya orang-orang dengan penghasilan rendah tidak sanggup melaksanakannya, sehingga tidak bisa memutuskan lingkaran kemiskinan.

⁴ Laga Priseptian dan Wiwin Priana Primandhana, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 24 No. 1, 2022, hlm. 46

⁵ Suropto dan Lalu Subayil, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di D.I.Yogyakarta Periode 2010-2017”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 132

⁶ Istiana Hermawati, dkk, *Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan*, (Yogyakarta: B2P3KS Press, 2015), hlm. 9

Hal ini diawali dari tingkatan gizi yang rendah menuju ke rendahnya tingkatan kesehatan sehingga mengakibatkan produktivitas yang rendah serta berakhir dengan tingkatan pemasukan yang lebih rendah (kemiskinan) lagi.⁷ Kondisi masyarakat yang tidak produktif akibat kemiskinan menimbulkan berbagai masalah sosial lain seperti menghambat proses pembangunan daerah, meningkatkan tindak kriminalitas dalam masyarakat, dan meningkatkan konflik antar masyarakat. Menurut data dari BPS, taraf kemiskinan di wilayah Kabupaten Tulungagung masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1
Jumlah Kemiskinan Kabupaten Tulungagung Tahun 2017—2021

Tahun	Jumlah Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin
2017	82.800	8,04 %
2018	75.230	7,27 %
2019	70.010	6,74 %
2020	76.400	7,33 %
2021	78.590	7,51 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 kemiskinan di Kabupaten Tulungagung sebanyak 82.800 jiwa atau 8,04 %, tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 75.230 jiwa atau menjadi 7,27 %, tahun 2019 turun kembali sebanyak 70.010 jiwa atau berkurang menjadi 6,74 %. Pada tahun 2020 hingga 2021 jumlah masyarakat miskin

⁷ Siti Hanifah dan Nurul Hanifa, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lamongan”, *Journal of Economics*, Vol. 1 No. 3, 2021, hlm. 192

di Kabupaten Tulungagung semakin meningkat. Hingga saat ini kasus kemiskinan ekstrem masih terjadi di wilayah Kabupaten Tulungagung yakni di Kecamatan Sendang, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Tanggunggunung.⁸ Hal ini menjadikan kemiskinan sebagai salah satu penghambat dalam pembangunan Kabupaten Tulungagung.

Kemiskinan dapat terjadi salah satunya dipengaruhi karena adanya jumlah penduduk. Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di suatu wilayah selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.⁹ Di Kabupaten Tulungagung, jumlah penduduk mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berikut data jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung dari tahun ke tahun.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2011—2021

Tahun	Jumlah Penduduk
2011	1.043.385 jiwa
2012	1.048.472 jiwa
2013	1.053.276 jiwa
2014	1.015.974 jiwa
2015	1.021.190 jiwa
2016	1.026.101 jiwa

⁸ Koranmemo.com, 2022, “Empat Kecamatan di Tulungagung ini Masuk Angka Miskin Ekstrem, Berikut Daftarnya”, diakses dari <https://www.koranmemo.com/daerah/pr-1923963418/empat-kecamatan-di-tulungagung-ini-masuk-angka-miskin-ekstrem-berikut-daftarnya> pada 22 September 2022

⁹ BPS, “Konsep”, dalam <https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>, diakses 20 September 2022

2017	1.030.790 jiwa
2018	1.110.921 jiwa
2019	1.118.814 jiwa
2020	1.123.325 jiwa
2021	1.089.775 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung dalam 10 tahun terakhir, jumlah penduduk mengalami kenaikan secara berkala. Dari yang awalnya sebesar 1.043.385 jiwa pada tahun 2011 meningkat menjadi 1.123.325 jiwa pada 2020. Namun, pada tahun 2021 jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan menjadi 1.089.775 jiwa karena adanya pandemi covid-19.

Jumlah penduduk ini akan menjadi sebuah masalah bagi pemerintah jika tidak bisa dikendalikan, karena jika jumlah penduduk tiap tahunnya makin bertambah, maka akan menyebabkan angka kemiskinan juga tinggi. Hal tersebut diperkuat dengan teori dari Robert Malthus yang menyatakan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan memperkecil pendapatan per kapita dan selanjutnya akan meningkatkan kemiskinan.¹⁰ Disamping itu, peningkatan jumlah penduduk berimplikasi pada standar hidup, penggunaan sumber daya dan lingkungan. Skenario ini menimbulkan tantangan bagi pembangunan kecuali langkah-langkah yang

¹⁰ Yuliansyah, "Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kemiskinan di Kalimantan Barat", *Jurnal Cross-Border*, Volume 4 No. 1, 2021, hlm. 635

tepat dilakukan untuk menyelesaikan dinamika populasi penduduk dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi.¹¹

Selanjutnya, permasalahan kemiskinan yang terjadi juga disebabkan oleh banyaknya pekerja yang menganggur atau tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran yang terjadi ini mengakibatkan seseorang tidak memperoleh pendapatan yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidupnya sehingga masih terdapat penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan atau dapat dikatakan tergolong miskin. Pengangguran dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.¹² Pengangguran ini biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Berikut data jumlah pengangguran di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 1.3
Jumlah Pengangguran Kabupaten Tulungagung Tahun 2011—2021

Tahun	Jumlah Pengangguran
2011	18.533 jiwa
2012	17.344 jiwa
2013	14.963 jiwa
2014	13.671 jiwa
2015	21.599 jiwa

¹¹ Sylvester Onyeoma, “*The Influence of Rising Population on Poverty and Unemployment in Nigeria*”, *Journal of Economics and Allied Research*, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 107

¹² Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 8

2016	21.367 jiwa
2017	12.197 jiwa
2018	14.835 jiwa
2019	19.201 jiwa
2020	27.951 jiwa
2021	29.630 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), pengangguran di Kabupaten Tulungagung menunjukkan rata-rata tingkat pengangguran mengalami kenaikan dan penurunan. Dimulai dari tahun 2011 tingkat pengangguran sebanyak 18.553 jiwa. Di tahun 2012—2014 tingkat pengangguran mengalami penurunan, kemudian di tahun 2015 mengalami peningkatan cukup drastis sebesar 21.599 jiwa, di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 12.197 jiwa sampai pada di tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar 29.630 jiwa.

Peningkatan lulusan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi tidak seiring dengan perluasan lapangan pekerjaan dan ruang serta peluang usaha juga masih terbatas. Banyaknya TKI yang pulang dan tidak bisa kembali bekerja juga memberi dampak signifikan. Sempitnya lapangan pekerjaan ini diperparah faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi, yang membuat para angkatan kerja tidak dapat berinovasi dengan menghasilkan lapangan kerja sendiri atau menjadi seorang wirausaha melainkan bergantung terhadap perusahaan-perusahaan yang menerima lapangan pekerjaan. Apalagi di era industri 4.0 ini, para pencari kerja dituntut lebih kreatif dan mempunyai keterampilan yang baik dalam menghadapi era

ini.¹³ Kejadian tersebut akan semakin menambah jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung. Menurut Akinmulegun, ia menemukan hubungan yang sangat kuat antara kemiskinan dan pengangguran. Ia berpendapat bahwa pengangguran merupakan akar dari kemiskinan karena bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang dapat dicapai.¹⁴ Dalam perencanaan penyerapan tenaga kerja, bahwa dengan melalui penambahan modal dalam setiap aktifitas pembangunan akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan penyediaan lapangan kerja secara total. Dengan demikian setiap penambahan investasi tentu akan mengubah kuantitas pengangguran di suatu wilayah.

Di samping itu, upah minimum juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja.¹⁵ Ditetapkannya upah minimum ini dimaksudkan sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan pekerja, dimana upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman agar tidak ada nilai upah yang lebih rendah dari upah

¹³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13

¹⁴ Tim MEZ Tazkia, *Buku Hitam Putih Ekonomi Islam*, (Bandung: Gulali Edukasi Indonesia, 2021), hlm. 6

¹⁵ Devanto Shasta Pratomo dan Putu Mahardika Adi Saputra, "Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkeadilan: Tinjauan UUD 1945", *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 5 No. 2, 2011, hlm. 270

minimum yang ditetapkan pemerintah. Tidak hanya itu, upah minimum juga melindungi dan menjamin kelangsungan usaha dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja produktif. Upah minimum di wilayah Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut data kenaikan UMK Kabupaten Tulungagung dari tahun 2011 sampai tahun 2021.

Tabel 1.4
UMK Kabupaten Tulungagung Tahun 2011—2021

Tahun	Besaran
2011	Rp815.000,-
2012	Rp1.007.900,-
2013	Rp1.007.900,-
2014	Rp1.107.900,-
2015	Rp1.273.050,-
2016	Rp1.420.000,-
2017	Rp1.537.150,-
2018	Rp1.671.035,-
2019	Rp1.805.220,-
2020	Rp1.958.844,-
2021	Rp2.010.000,-

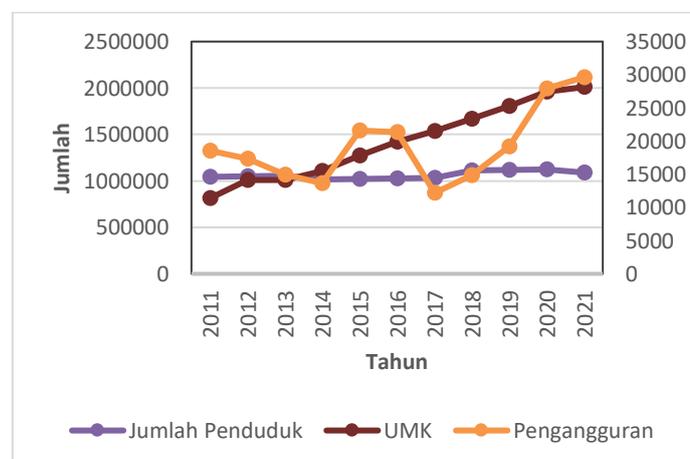
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan data diatas UMK Kabupaten Tulungagung pada tahun pada tahun 2011 sebesar Rp815.000,- kemudian semakin meningkat sampai menyentuh angka Rp2.010.000,- pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Tulungagung selalu mengalami peningkatan setiap tahun meskipun

dengan persentase yang kecil. Misalnya, pada tahun 2020 ke 2021 kenaikan UMK hanya sekitar 0,03%.

Peningkatan UMK di Kabupaten Tulungagung tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang terus meningkat tajam. Setiap kepala keluarga dengan gaji UMK memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang lain sehingga apabila kenaikan UMK tidak sebanding dengan kebutuhan tersebut maka akan sulit bagi sebuah keluarga mencapai kesejahteraan yang kemudian hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, upah minimum di Kabupaten Tulungagung yang mengalami peningkatan setiap tahunnya masih tertekan oleh adanya inflasi sehingga masyarakat menjadi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mahal seiring kenaikan harga barang dan jasa.

Grafik 1.1
Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan UMK Kabupaten Tulungagung Tahun 2011—2021



Sumber: Data olahan peneliti, 2023

Grafik diatas menunjukkan fluktuasi dari jumlah penduduk, pengangguran dan Upah Minimum Kabupaten Tulungagung. Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung selalu mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Upah minimum juga menunjukkan kenaikan dari waktu ke waktu sedangkan angka pengangguran mengalami fluktuasi.

Fenomena jumlah penduduk, pengangguran dan jumlah upah minimum yang terjadi di Kabupaten Tulungagung ini seringkali dianggap menjadikan lingkaran kemiskinan semakin sulit untuk diputuskan. Proses ini berlangsung secara timbal balik dan saling terkait, yang pada akhirnya secara akumulatif memperlemah masyarakat miskin. Masalah ini jika tidak segera ditanggulangi akan memperparah kondisi masyarakat miskin, yang berdampak pada lemahnya etos kerja, rendahnya daya perlawanan terhadap berbagai persoalan hidup, kebiasaan-kebiasaan buruk yang terpaksa mereka lakukan sebagai jalan pintas untuk mempertahankan hidup mereka, apabila keadaan ini berkelanjutan, maka akan melahirkan budaya kemiskinan yang sulit untuk diberantas. Merujuk pada penjelasan di atas, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul **Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan pada tahun 2011—2021. Jumlah penduduk ini bisa menjadi sebuah permasalahan jika tidak bisa dikendalikan pertumbuhannya.
2. Pengangguran di Kabupaten Tulungagung mengalami fluktuasi pada tahun 2011—2021. Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur dapat mempengaruhi kurangnya pendapatan masyarakat.
3. UMK di Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan pada tahun 2011—2021. Upah minimum merupakan sumber penghasilan, ketika sumber penghasilan mengalami penurunan atau tetap maka akan mempengaruhi tingkat kemiskinan.
4. Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak menentu pada tahun 2011—2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Tulungagung?

2. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah upah minimum kabupaten berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Tulungagung?
4. Apakah jumlah penduduk, pengangguran, dan upah minimum kabupaten secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam melaksanakan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum kabupaten terhadap kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan upah minimum kabupaten secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teori sebagai pengembangan teoritis maupun dalam bentuk praktik yang kaitannya memecahkan sebuah permasalahan secara aktual.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung” diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan dalam bidang Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait tentang pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan upah minimum kabupaten terhadap kemiskinan sehingga dapat dijadikan referensi dalam pengentasan kemiskinan di masa yang akan datang.

b. Untuk akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, acuan, dan referensi bagi mahasiswa, staf dan pengajar lainnya, khususnya jurusan Ekonomi Syariah untuk menambah wawasan keilmuan secara teori dan juga praktik.

c. Untuk penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan kemiskinan.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan yang memudahkan untuk dilaksankannya suatu penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu sebuah objek. Ruang lingkup dan batasan masalah yang diberikan dalam penelitian bertujuan untuk menghindari adanya pembahasan yang meluas dari tema studi. Adapun variabel-variabel yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini berfokus pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Jumlah Penduduk (X1), Pengangguran (X2), dan Upah Minimum Kabupaten (X3), sedangkan variabel terikat (Y) adalah Kemiskinan.

2. Keterbatasan Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, mendalam, dan sempurna maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu adanya pembatasan penelitian. Maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian ini membatasi diri hanya dilakukan di Kabupaten Tulungagung.

2. Data yang digunakan adalah Jumlah Penduduk, Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung dari lembaga BPS dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.
3. Jenis data yang digunakan adalah data *time series*.
4. Periode tahun yang di analisis yaitu beberapa tahun kebelakang.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah unsur dalam penelitian yang menerangkan teori dan karakteristik. Berdasarkan teori tersebut maka dapat disimpulkan definisi konseptual dari masing-masing variabel sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu wilayah selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.¹⁶
- b. Pengangguran adalah keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.¹⁷
- c. Upah Minimum Kabupaten (UMK) adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang

¹⁶ BPS, “Konsep”, dalam <https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>, diakses 10 November 2022

¹⁷ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan...*, hlm. 8

ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman dan berlaku di wilayah kabupaten/kota.¹⁸

- d. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak mampu memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, serta rasa dihormati orang lain.¹⁹

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam proposal skripsi ini yaitu penjabaran masalah-masalah tertentu yang timbul dari suatu penelitian yang menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan judul proposal skripsi. Secara operasional penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari Jumlah Penduduk (X1), Pengangguran (X2), dan Upah Minimum Kabupaten (X3). Sedangkan variabel terikatnya adalah Kemiskinan (Y).

¹⁸ Dalinama Telaumbanua, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Deepublisher, 2019), hlm. 35

¹⁹ Suropto dan Lalu Subayil, "Pengaruh Tingkat Pendidikan...", hlm. 132

H. Sistematika Skripsi

1. Bagian Awal

Bagian awal penulisan skripsi ini terdiri dari halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar grafik, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Bab I Pendahuluan

Untuk memberikan gambaran secara singkat bagaimana nantinya pembahasan yang akan diangkat dalam penelitian ini, dalam bab pendahuluan ini didalamnya membahas beberapa unsur yang terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, (h) sistematika skripsi.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan berbagai konsep dan penjelasan tentang teori dari variabel-variabel penelitian. Dalam bab ini terdiri dari: (a) teori jumlah penduduk, (b) teori pengangguran, (c) teori upah minimum kabupaten, (d) teori kemiskinan, (e) kajian penelitian terdahulu, (f) kerangka konseptual, dan (g) hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini memuat rancangan penelitian, yakni yang terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi dan teknik sampling, (c) sumber data, variabel, dan skala pengukuran, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, (e) teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi (a) deskripsi data oleh peneliti. Selanjutnya dijelaskan dalam bentuk (b) analisis data tentang temuan penelitian yang sudah dilakukan serta menyajikan hasil pengujian hipotesis.

Bab V Pembahasan

Dalam bab kelima ini akan dijelaskan untuk hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan lalu dikaitkan dengan teori yang sudah ada untuk selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan.

Bab VI Penutup

Pada bab keenam ini memaparkan mengenai (a) kesimpulan serta (b) saran dari penulis tentang temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada variabel.

Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari (a) daftar pustaka serta (b) lampiran-lampiran.